

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan sumber daya manusia serta dukungan dari berbagai aspek termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan akan memberikan dampak positif pada terserapnya angkatan kerja dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi inilah yang ingin dicapai dalam setiap pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.

Pembangunan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan (*man made resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. (Risnawati, 2019)

Tercapainya pembangunan ditandai dengan perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. (Todaro, 2008). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi secara umum dapat dilihat dari tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pembangunan menuju kearah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. (Risnawati, 2019)

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya, dari satu periode ke periode lainnya. Suatu negara akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi dan keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya dimana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Dalam konteks syariah Islam, keberhasilan pembangunan harus mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan yang mencakup semua aspek kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kesejahteraan material (*material welfare*) dan kesejahteraan non material (*non material welfare*) yang merupakan hal yang paling mendasar dari tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu mengangkat derajat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan berkesinambungan. Tidak hanya pencapaian secara fisik namun juga non fisik, dalam artian bahwa pembangunan tidak hanya mencakup masalah ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya tetapi juga mencakup masalah religiusitas manusia itu sendiri. (Irwan Habibi Hasibuan, 2018)

Tingkat kesejahteraan muncul karena adanya pandangan hidup (*worldview*) berupa prinsip tauhid, prinsip khilafah serta prinsip 'adalah dengan cara strategi-strategi ekonomi yang berlandaskan tujuan-tujuan syariah. Dewasa ini telah banyak penelitian yang membahas perhitungan pertumbuhan berlandaskan Maqāsid Syarī'ah seperti *Islamic Human Development Index* dan *Islamic Economic Development Index*. (Hasan et al., 2018) Juga seperti *Economic Islamicity Index* (EI2). Namun, permasalahan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan dengan Maqāsid Syarī'ah, terbatas dengan ketersediaan data yang sangat minim. Mengingat, adanya Indeks yang berkaitan dengan perhitungan

konsekuensi ke-Islaman seorang muslim, seperti perhitungan Puasa, Shalat dan Zakat sebagai pilar Agama Islam. (Chapra, 2008)

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2:172) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Filosofi dasar pembangunan dalam pandangan Islam adalah : *Tauhid*, *Rububiyah* dan *Khilafah*. Dengan dasar tersebut pembangunan dalam konsep Islam memiliki karakter yang komprehensif dan mencakup aspek moral, spritual dan material.

Konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi Islam sesungguhnya jadi alternatif dalam merumuskan kembali arti dari nilai pembangunan manusia itu sendiri. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi adalah sangat unik serta memiliki kekhasan dan berbeda dengan pandangan pembangunan ekonomi konvensional, khususnya pada pokok yang sangat mendasar. (Rukiah, 2019)

Namun demikian, ukuran-ukuran yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di seluruh negara dan wilayah masih mengacu dan menggunakan konsep pembangunan konvensional yang hanya melihat seberapa besar perekonomian suatu negara atau wilayah, dimana salah satu yang ukuran yang menentukan keberhasilan pembangunan secara umum digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tidak adanya pertumbuhan berarti terhambatnya aktivitas kehidupan ekonomi yang akan berakibat kepada berkurangnya *income* yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi human capital, tingkat kelahiran, konsumsi pemerintah, aturan hukum, ketentuan perdagangan, rasio investasi, dan inflasi. (Safitri & Sriyana, 2016) Disamping itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor langsung seperti misalnya sumber daya manusia (meningkatkan populasi aktif, berinvestasi dalam modal manusia), sumber daya alami (tanah, sumber daya bawah tanah), peningkatan modal yang digunakan atau kemajuan teknologi, dan faktor tidak langsung seperti lembaga (lembaga keuangan, administrasi swasta dll), ukuran permintaan agregat, tingkat tabungan dan tingkat investasi, efisiensi sistem keuangan, kebijakan anggaran dan fiskal, migrasi tenaga kerja dan modal dan efisiensi pemerintah. Setidaknya ada empat faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi, tetapi para peneliti memberikan determinan yang selalu berbeda. (Boldeanu & Constantinescu, 2015)

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, telah menunjukkan perkembangan perekonomian kearah yang positif sejak krisis finansial Asia di akhir 1990an. PDB nasional terus meningkat, dari \$857.807 pada tahun 2000 menjadi \$3.8747 pada 2018, meskipun tengah berlangsung ketidakpastian global dimana permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan. Dengan didukung oleh investasi yang kuat, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kokoh, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen tahun 2019, mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2018 yang sebesar 5,17 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 5,07 persen dan sebesar 5,03 persen di tahun 2016.

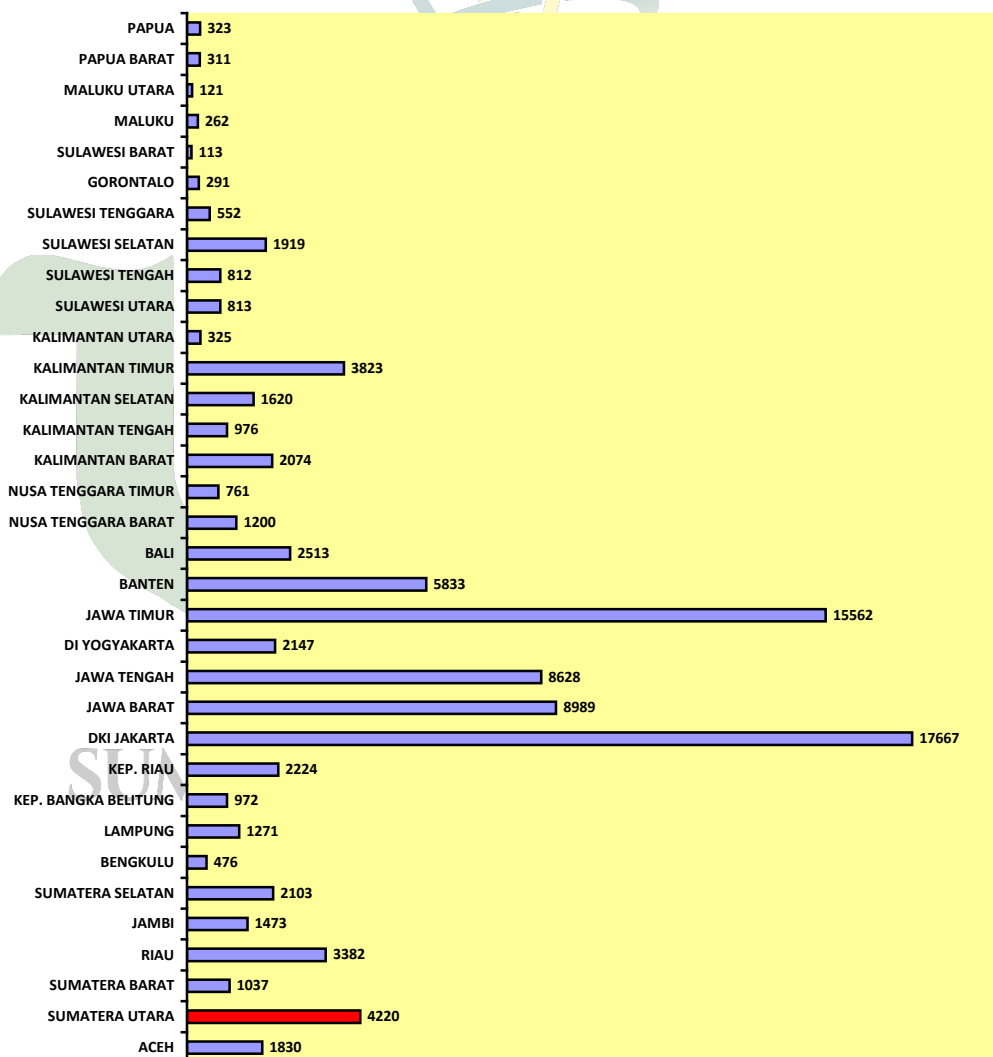
Jika dianalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia, maka Provinsi Sumatera Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 5,22 persen di tahun 2019 masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,18 persen dan di tahun 2017 sebesar 5,12 persen, sedangkan pada tahun 2016, tercatat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara sebesar 5,18 persen.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia
Tahun 2016 - 2019**

No.	Provinsi	2016	2017	2018	2019
1	ACEH	3,29	4,18	4,61	4,14
2	SUMATERA UTARA	5,18	5,12	5,18	5,22
3	SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,14	5,01
4	RIAU	2,18	2,66	2,35	2,81
5	JAMBI	4,37	4,60	4,69	4,37
6	SUMATERA SELATAN	5,04	5,51	6,01	5,69
7	BENGKULU	5,28	4,98	4,97	4,94
8	LAMPUNG	5,14	5,16	5,23	5,26
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,10	4,47	4,45	3,32
10	KEP. RIAU	4,98	1,98	4,47	4,84
11	DKI JAKARTA	5,87	6,20	6,11	5,82
12	JAWA BARAT	5,66	5,33	5,65	5,07
13	JAWA TENGAH	5,25	5,26	5,30	5,40
14	DI YOGYAKARTA	5,05	5,26	6,20	6,59
15	JAWA TIMUR	5,57	5,46	5,47	5,52
16	BANTEN	5,28	5,75	5,77	5,29
17	BALI	6,33	5,56	6,31	5,60
18	NUSA TENGGARA BARAT	5,81	0,09	- 4,50	3,90
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5,12	5,11	5,11	5,24
20	KALIMANTAN BARAT	5,20	5,17	5,07	5,09
21	KALIMANTAN TENGAH	6,35	6,73	5,61	6,12
22	KALIMANTAN SELATAN	4,40	5,28	5,08	4,08
23	KALIMANTAN TIMUR	- 0,38	3,13	2,64	4,74
24	KALIMANTAN UTARA	3,55	6,80	5,36	6,90
25	SULAWESI UTARA	6,16	6,31	6,00	5,65
26	SULAWESI TENGAH	9,94	7,10	20,56	8,83
27	SULAWESI SELATAN	7,42	7,21	7,04	6,91
28	SULAWESI TENGGARA	6,51	6,76	6,40	6,50
29	GORONTALO	6,52	6,73	6,49	6,40
30	SULAWESI BARAT	6,01	6,39	6,26	5,67
31	MALUKU	5,73	5,82	5,91	5,41
32	MALUKU UTARA	5,77	7,67	7,86	6,10
33	PAPUA BARAT	4,52	4,02	6,25	2,66
34	PAPUA	9,14	4,64	7,32	-15,75
	INDONESIA	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : BPS, Indonesia Dalam Angka Tahun 2017-2020

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan laju pertumbuhan sebesar 5,22 persen di tahun 2019 berada di posisi ke 20 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Sumatera Utara cenderung mengalami masalah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, sedangkan potensi sumber daya alam serta potensi sumber daya manusia (memiliki penduduk sebesar 14.798,4 jiwa dan terbanyak diluar pulau Jawa) di Sumatera Utara lebih besar dan menjadi sentra perekonomian (dengan investasi dalam negeri terbesar diluar pulau Jawa sebanyak 4.220 unit) di luar Pulau Jawa. (BPS, 2020a)



Sumber : BPS, Indonesia Dalam Angka, Tahun 2020

Gambar 1.1. Realisasi Investasi Dalam Negeri Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, menurut Nurkse dalam Jhingan adalah investasi, dimana investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Artinya, jika investasi meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan meningkatkan investasi. Rendahnya investasi yang dikarenakan terbatasnya tingkat tabungan menyebabkan stok modal berkurang.(Palupy & Basuki, 2019)

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDB/ PDRB tidak bisa dipisahkan oleh adanya peningkatan investasi. Karena disamping mendorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan input yang kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Investasi berperan sebagai pembiayaan bersumber dari dalam dan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan dana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.(Risnawati, 2019)

Salah satu kegiatan dalam menghasilkan dan menambah investasi adalah kegiatan penanaman modal yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN,

terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja.(Astuti, 2018)

Disamping itu, investasi merupakan salah satu parameter keberhasilan pembangunan baik dalam sistem pemerintahan sentralistik maupun desentralistik. Hal ini disebabkan, investasi memiliki *multiplier effect* yang mencakup penyerapan tenaga kerja yang secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan makin bertumbuhnya aktivitas ekonomi disekitar lokasi, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada perekonomian daerah.

Indikator lain dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia, yang mengacu kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi angka IPM suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dari data yang dirilis BPS tahun 2020, nilai IPM Indonesia sebesar 71,94 di tahun 2020, sedangkan nilai IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 71,99 yang berada pada peringkat ke 14 seluruh Provinsi di Indonesia dan berada diperingkat 7 diluar pulau Jawa. IPM tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 80,77 di tahun 2020, sedangkan IPM terendah berada di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,44.(BPS, 2020a)

Menurut UNDP, Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu : panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan diatas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.(UNDP, 2019)

UNDP juga mengukur dan menyusun ketiga pilihan tersebut dalam suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu : angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

IPM atau HDI dalam konteks Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan tuntunan untuk mencapai tidak hanya pencapaian kesejahteraan dunia akan tetapi juga pencapaian kesejahteraan di akhirat kelak.

Konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi Islam sesungguhnya jadi alternatif dalam merumuskan kembali arti dari nilai pembangunan manusia itu sendiri. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi adalah sangat unik serta memiliki kekhasan dan berbeda dengan pandangan pembangunan ekonomi konvensional, khususnya pada pokok yang sangat mendasar. (Rukiah, 2019) Oleh karena itu pengukuran *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia) yang dihitung berdasarkan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu *life expectancy at birth*, *adult literacy rate*, *mean years of schooling*, dan *purchasing power parity*, perlu diperluas sesuai konsep *maqashid*, yang disebut dengan I-HDI.

I-HDI memiliki 5 (lima) indeks dalam penghitungannya, yaitu : Indeks Din (Menjaga Agama), Indeks Nash (Menjaga Keturunan), Indeks Nafs (Menjaga Kesehatan), Indeks 'Aql (Menjaga Akal/Pendidikan) dan Indeks Mal (Menjaga Harta), (Anto, 2011)

Disamping kedua indikator tersebut dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, peran lembaga keuangan/ perbankan sebagai pendorong dan mendominasi dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang

menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi agar produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. (Syahputra & Ningsih, 2020)

Perbankan merupakan salah satu yang mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian suatu negara atau daerah, karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah juga bergantung pada kontribusi nyata dari perbankan. Ketika perbankan terpuruk perekonomian nasional juga akan ikut terdampak, demikian pula sebaliknya.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama perbankan dan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada masyarakat untuk digunakan kegiatan ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank merupakan pembentukan modal yang paling ideal dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara makin banyak pengusaha inovatif yang tersedia makin cepat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dengan demikian salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah mengembangkan golongan usahawan dalam masyarakat dan menggalakkan mereka untuk melakukan penanaman modal.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Dalam kegiatan operasionalnya pembiayaan bank memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pembiayaan investasi dengan sistem yang diterapkan. Pembiayaan investasi sebagai bentuk pengelolaan dana guna

memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *coumpounding*. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi proyek yang sudah ada.

Pada umumnya pembiayaan investasi yang terlibat dalam tingkat pertumbuhan ekonomi lebih kepada *real investment* melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik yang pada akhirnya pembiayaan investasi pada bank dapat mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil, perluasan kesempatan berusaha yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan memberikan dampak positif juga bagi peningkatan pendapatan pekerja (upah). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kedudukan tenaga kerja sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (Barimbing & Karmini, 2015)

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang

menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara - negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, sudah menjadi masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju.

Menurut Parhah semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan di dalam perekonomian. Keterampilan (*skill*), tingkat pendidikan, daya kreasi yang dimiliki tenaga kerja merupakan indikator penting yang harus dimiliki tenaga kerja dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan secara optimum. Artinya bahwa semakin tinggi kemampuan tenaga kerja baik itu skill, tingkat pendidikan, dan lain-lain akan meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah/ wilayah diantaranya, adalah investasi baik investasi asing maupun dalam negeri, kualitas sumber daya manusia yang diukur dari *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (HDI/IPM), lembaga perbankan, yang dalam hal ini diukur dari pembiayaan perbankan, ketenagakerjaan yang dalam penelitian ini diproksi dari penyerapan tenaga kerja/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Perkembangan indikator makro ekonomi sosial di Provinsi Sumatera Utara, disajikan dalam Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2. Indikator Makro Ekonomi-Sosial Sumatera Utara
Tahun 2015 – 2019**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Investasi (Milyar Rp)	HDI (Persen)	Pembiayaan Perbankan (Milyar Rp)	Penyerapan Tenaga Kerja (Persen)
2015	5,10	4.287,40	69,51	3.498.815	67,28
2016	5,18	4.954,80	70,00	3.817.953	65,99
2017	5,12	11.683,60	70,57	4.136.145	68,88
2018	5,18	8.371,80	71,18	4.595.776	71,82
2019	5,22	19.749,00	71,74	4.935.772	70,19

Sumber : BPS, Indonesia Dalam Angka Tahun 2016-2020

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa investasi di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2015 hingga 2019 secara umum mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar Rp. 4.287,40,- milyar di tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 19.749,- milyar di tahun 2019. Namun jika dianalisis lebih detail, perubahan investasi dari tahun ketahun selama masa penelitian dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa, di tahun 2016-2017, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, justru investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian pula, di tahun 2017-2018 ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, namun investasi justru mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya *gap* antara teori yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dimana investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan tak berujung pangkal (*vicious circle*). Disamping itu, hasil penelitian oleh Henty, Maruto, Risnawati, Zakaria, yang menyatakan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan investasi adalah linier positif.

Disisi lain, nilai HDI selama kurun waktu penelitian terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 69,51 persen di tahun 2015 menjadi sebesar 71,74

persen di tahun 2019. Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan waktu penelitian yang sama, maka di tahun 2016-2017 yang terjadi gap secara teori. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 5,18 persen menjadi 5,12 persen di tahun 2017, sebaliknya nilai HDI Sumatera Utara mengalami peningkatan, yaitu sebesar 70,00 persen di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017, menjadi sebesar 70,57 persen.

Aurora dalam jurnal *Economic growth, human capital and structural change : A dynamic panel data analysis* menyimpulkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan HDI yang dalam hal ini merupakan proxy dari *Human capital*, diidentifikasi sebagai salah satu determinan utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan teknologi di suatu negara. Berdasarkan hasil estimasi dari dynamic panel data, human capital dan productive specialization merupakan faktor yang sangat krusial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak berbeda dengan HDI, variabel makro ekonomi lainnya yaitu pembiayaan perbankan selama tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2015 pembiayaan perbankan sebesar Rp. 3.498.815,- milyar dan di tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 4.935.772,- milyar. Namun demikian untuk variabel pertumbuhan ekonomi di tahun 2016-2017 mengalami penurunan.

Secara umum, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu investasi, *Islamic Human Development Index* dan pembiayaan perbankan secara teori dan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ketiga variabel yang digunakan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian secara fakta menunjukkan bahwa terjadi gap diantara variabel tersebut dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, dampak dari pengaruh variabel investasi, *Islamic Human Development Index* dan pembiayaan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data yang ada, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, dimana pertumbuhan ekonomi yang

digunakan sebagai variabel intervening tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Fahrani dan Abduh, menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pembiayaan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Serhat pembiayaan perbankan syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian dan industri. Alasan utama atas hasil ini ialah masih kecilnya persentase perbankan syariah pada sistem perbankan. Ketiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu investasi, IHDI dan pembiayaan perbankan dalam menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya bagi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara, secara agregat selama tahun 2015 sebesar 67,28 persen hingga tahun 2019 menjadi sebesar 70,19 persen mengalami peningkatan. Artinya bahwa peningkatan pada variabel pertumbuhan ekonomi dengan ke-3 variabel independennya mampu memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Todaro (2000), menjelaskan bahwa model ekonomi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah Model Makro Output-Kesempatan kerja (*output employment macro model*) yang berfokus pada hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output dan penciptaan lapangan kerja. Perhatian utama dari model pertumbuhan ini adalah pada kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, sehingga model ini mengisyaratkan bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan GNP-nya, suatu negara dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

Agustinus (2012), menunjukkan bahwa variabel investasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan M. Taufik (2014), menemukan hasil bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan

ekonomi dan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Barro (1997), berdasarkan penelitiannya terhadap kurang lebih 80 negara terdapat beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi. beberapa faktor tersebut meliputi *human capital*, tingkat kelahiran, konsumsi pemerintah, aturan hukum, ketentuan perdagangan, rasio investasi, dan inflasi. (Safitri & Sriyana, 2016)

Namun demikian, jika diamati dan dianalisis lebih jauh, bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya berbeda dengan teori dan konsep yang menyatakan bahwa investasi, HDI dan pembiayaan perbankan akan mempengaruhi secara positif laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, artinya adalah jika investasi, nilai HDI dan pembiayaan perbankan meningkat akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, jika investasi, nilai HDI dan pembiayaan perbankan menurun maka akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu disusunlah indikator-indikator yang akan diteliti dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah investasi, pembiayaan perbankan dan *Islamic Human Development Index* (IHDI) serta dampaknya terhadap indikator ketenagakerjaan dan upah, yang mengambil studi kasus di kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dirangkum dari uraian dan penjelasan diatas adalah:

1. Bagaimana pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara ?

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap upah pekerja di kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara ?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara ?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah pekerja kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara ?

C. Batasan Istilah

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah atau negara yang dihitung dari PDB/PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.
2. Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP dan dalam permintaan agregat serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja.
3. *Islamic Human Development Index* merupakan sebuah indeks komposit tunggal dalam pengukuran 5 (lima) dimensi Maqshid Syari'ah, yang terdiri dari pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu al-'aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*).
4. Pembiayaan perbankan merupakan kegiatan perbankan dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu negara.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan bagian dari aspek ketenagakerjaan yang terdiri dari penduduk dengan usia 15-64 tahun yang

tidak/ belum bekerja atau penduduk yang melaksanakan kegiatan lainnya misalnya sekolah dan menjadi pengurus rumah tangga.

6. Upah tenaga kerja merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau instansi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam memediasi pengaruh investasi, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan pembiayaan perbankan terhadap upah pekerja di kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah pekerja kabupaten/ kota provinsi Sumatera Utara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai alat untuk mengidentifikasi dan bahan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah, komprehensif, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan kearah yang lebih baik.

2. Sebagai bahan perencanaan bagi regulator dalam menentukan kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah agar lebih mengakomodasi dimensi pembangunan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berdampak pada terserapnya tenaga kerja serta peningkatan pendapatan yang berorientasi islami.
3. Sebagai masukan bagi kaum akademisi untuk lebih banyak lagi melakukan kajian dan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi serta dampaknya yang bernuansa islami di Sumatera Utara yang relatif masih jarang dilakukan. Diharapkan dengan semakin banyaknya penelitian akan semakin terbuka informasi dan cara-cara yang efektif guna mencapai pembangunan yang islami di Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian disajikan dalam lima bab untuk memperoleh bahasan yang sistematis di setiap bab, berikut ini :

- **BAB I**

Berupa pendahuluan sebagai acuan dasar penelitian mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

- **BAB II**

Berupa Landasan Teori, yang menjelaskan teori terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, *Islamic Human Development Index*, pembiayaan perbankan dan ketenagakerjaan serta upah tenaga kerja. Disamping itu pada bab ini juga dilengkapi dengan uraian kajian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

- **BAB III**

Berupa metodologi penelitian, mengungkap jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi operasional serta alat dan teknik pengumpulan data.

- BAB IV

Membahas temuan hasil penelitian, analisis deskriptif, hasil uji model serta pembahasan terkait hasil penelitian.

- BAB V

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN